

**URGENSI *PLEA BARGAINING SYSTEM* DALAM PEMBAHARUAN  
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

(Studi Perbandingan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat)

PENULISAN HUKUM

Oleh:  
RUCHOYAH  
201410110311139



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PENULISAN HUKUM**

**URGENSI *PLEA BARGAINING SYSTEM* DALAM PEMBAHARUAN  
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

(Studi Perbandingan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

**RUCHOYAH**

201410110311139



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**URGENSI PLEA BARGAINING SYSTEM DALAM PEMBAHARUAN  
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN  
PLEA BARGAINING SYSTEM DI AMERIKA SERIKAT)**

Diajukan Oleh:

**RUCHOYAH**

**201410110311139**

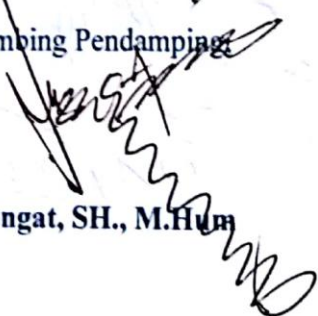
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Januari 2018

Pembimbing Utama,

  
**Mokh. Najih, SH., M.Hum., P.hD.**

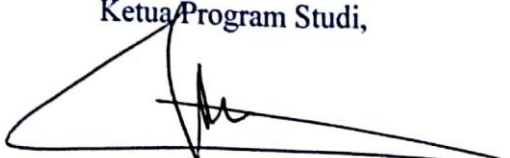
Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Tongat, SH., M.Hum**



**Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**RUCHOYAH**

**201410110311139**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Januari 2018

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mokh. Najih, SH., M.Hum., P.hD.

Sekretaris : Dr. Tongat, SH., M.Hum

Penguji I : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RUCHOYAH  
NIM : 201410110311139  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI PLEA BARGAINING SYSTEM DALAM PEMBAHARUAN  
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN  
PLEA BARGAINING SYSTEM DI AMERIKA SERIKAT)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Januari 2018



Ruchdyah

**Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada:**

- Alm. Aba dan Umi, serta Keluarga;
- Sahabat-sahabatku;
- Saudara-saudara seperjuangan di “Rumah Ide 47” Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
- Teman-teman seperjuangan FH UMM 2014.



## ABSTRAKSI

**Nama** : Ruchoyah  
**Nim** : 201410110311139  
**Judul** : Urgensi *Plea Bargaining System* dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Perbandingan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat)  
**Pembimbing** : Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D  
Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Proses peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini masih terdapat berbagai permasalahan yang belum mampu terpecahkan, salah satunya mengenai penumpukan perkara dalam lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia. Masalah penumpukan perkara menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini berjalan kurang efektif dan efisien sehingga sampai saat ini proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak mampu diwujudkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimana konsep *Plea Bargaining System* dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. 2) Bagaimana urgensi *Plea Bargaining System* dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*), dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Tulisan ini hendak memberikan *legal problem solving* terhadap permasalahan penumpukan perkara pidana di Indonesia yang hingga saat ini belum mampu terpecahkan, yakni dengan menerapkan *plea bargaining system* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan melakukan studi perbandingan penerapan *plea bargaining system* dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Urgensi menerapkan *plea bargaining system* yakni guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam sila ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, selain itu sebagai pengimplementasian dari Pasal 4 ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* sebagai upaya mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kesimpulan dan rekomendasi penulis yakni menerapkan *plea bargaining system* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia guna terwujudnya peradilan pidana yang efektif dan efisien.

**Kata Kunci** : *Legal Problem Solving, Plea Bargaining, perkara.*



## ABSTRACT

**Nama** : Ruchoyah  
**Nim** : 201410110311139  
**Judul** : Urgency of *Plea Bargaining System* in the renewal of criminal justice system in Indonesia ( The comparative study of *Plea Bargaining System* in United States)  
**Pembimbing** : Mokh. Najih, S.H., M.Hum.,Ph.D  
Dr. Tongat, S.H., M.Hum

The process of criminal justice system in Indonesia up to this time still become issues that have not been resolved, one of them is the stacking of the criminal justice system in Indonesia. The stacked problem of cases shows that the criminal justice system in Indonesia has been less effective and efficient so that until now a simple, quick and lightweight judicial process cannot be realized in the criminal justice system in Indonesia. The problems that will be investigated in this paper is 1) how the concept of *Plea Bargaining System* in the criminal justice system in the United States. 2) How the urgency of *Plea Bargaining System* in the renewal of criminal justice system in Indonesia. The research method was conducted by means of normative juridical research type (*normative legal research*), by using conceptual approach and comparative approach.

This research gives a legal problem solving toward the stacked problems of criminal cases in Indonesia that are currently not able to solve, is the implementation of *plea bargaining system* in the renewal of the criminal justice system in Indonesia by conducting comparative studies of the implementation of *plea bargaining system* in the criminal justice system in the United States. The urgency apply *plea bargaining system* in order to give common prosperity and social justice, as mandated in fourth pillar at the preamble 1945 Constitution of the Republic Indonesia, furthermore as the implementation in article 4 section (2) of the constitution number 49 year 2009 about Judicial Power and article 9 of the constitution number 12 year 2005 about the Legalization of *The International Covenant On Civil and Political* as an effort to realize the purpose of law are certainty, justice and benefit of law. The conclusions and the recommendations is the author in apply *plea bargaining system* in the renewal of the criminal justice system in Indonesia in order to realize an effective and efficient criminal justice.

**Keyword** : *Legal Problem Solving, Plea Bargaining, Cases.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamina Maha besar Allah SWT, Sang pemilik Segala Ilmu dan Semesta Alam, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sesungguhnya hidup, mati, dan ibadahku hanya untuk-Nya. Sholawat dan Salam tercurahkan baginda Rosulullah SAW yang selalu penulis rindukan, beliau sebagai suri tauladan contoh kehidupan bagi umat muslim. hingga sampai saat ini juga, penulis bisa merasakan indahnya islam dan manisnya iman.

Proses menyelesaikan tugas akhir ini mengajarkan penulis tentang banyak hal. Tentang perjuangan, mimpi-mimpi, dan tentang maha luasnya Ilmu Tuhan. Menyelesaikan tugas akhir ini adalah hal yang membanggakan bagi penulis, karena menjadi pertanggung jawaban penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Alm.Abah yang telah bahagia ditempatNYA. "Umi" sosok yang paling berharga dalam hidup penulis, serta kakak-kakak penulis tercinta terimakasih yang tiada terhingga atas kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus untuk penulis;
2. Drs. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor baru UMM, yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya. Semoga dapat membawa UMM menjadi lebih baik;
3. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, selaku mantan Rektor UMM yang mengukuhkan penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum UMM pada tahun 2014. Penulis bangga pernah dipimpin bapak di kampus putih, semoga amanah dengan tugas yang baru sebagai Menteri Pendidikan RI;
4. Mokhammad Najih, SH.,M.Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I sekaligus penulis anggap sebagai "Ayah" sendiri yang telah ikhlas dan sabar membimbing penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Melalui bimbingan dan saran-saran konstruktif, penulis banyak menimba ilmu;
5. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Dosen Pembimbing II sekaligus dosen wali penulis terimakasih atas segala bimbingan yang diberikan kepada penulis, Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum. (Pembantu Dekan I), Dr. Haris, S.H.,M.Hum (Pembantu Dekan II), Said Noor P, S.H.,M.H (Pembantu Dekan III), dan Bayu Dwi Widdy Djatmiko, S.H., M.Hum Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, terimakasih telah menjadi motivator penulis;
6. Cekli Setya Pratiwi, S.H., L.LM., selaku dosen penulis yang luar biasa, beliau telah bersedia menjadi tempat "keluh-kesah" penulis selama penulis melakukan study di Fakultas Hukum UMM serta yang selalu memberikan banyak motivasi dan inspirasi kepada penulis, dan selalu sabar membimbing penulis saat penulis membutuhkan bimbingannya;

7. Sofyan Arief, S.H.,M.Kn., serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UMM. Terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini;
8. Instruktur dan teman-teman asisten Laboratorium Fakultas Hukum UMM, serta pejabat Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Sahabat-sahabat terbaikku, Syifa SPsi, Wirdan SH, Febri SH, Richa SH, Zatwa SH, Dea SH, Petre SH, Anita SH, Gurnita SH, Ratri SH, Hana SH yang selalu memberikan semangat saat penulis dalam keadaan susah, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik selama menempuh study di Malang, khususnya di Fakultas Hukum UMM. Dan Sunarto Efendi, SH yang turut memberikan saran-saran kepada penulis untuk penulisan tugas akhir ini. Terimakasih;
10. Komunitas Riset dan Debat FH UMM, Komunitas Peradilan Semu FH UMM, dan Recht Basketball Assosiation yang selalu menjadi obat dikala penulis merasakan jenuhnya bangku perkuliahan serta yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran untuk penulis;
11. Kawan-kawan se-Ideologi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tempat penulis belajar berorganisasi. Terimakasih kepada Kakanda-kakanda senior yang selalu memberikan nasihat pada penulis untuk terus belajar dan berproses;
12. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2014, penulis bangga pernah belajar dan berjuang bersama kalian.
13. BAE, My Support System, thankyou for being the one who always support me, give me a lot of spirit to finishing this final project. Thanks for everything.

Akhir kata, *al-insanu mahallul khata' wan nisyan* Segala bentuk kekurangan dalam tugas akhir ini adalah semata-mata karena keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan untuk perbaikan Tugas Akhir ini dimasa mendatang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua.

Penulis

Ruchoyah

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan.....	12
D. Manfaat dan Kegunaan.....	13
E. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan .....	14
2. Jenis Bahan Hukum.....	16
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	18
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>20</b>
A. Sistem Peradilan Pidana .....	20
1. Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana .....	20
2. Model Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana .....	27
B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	33
1. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	33
2. Tahap-Tahap Proses Peradilan Pidana di Indonesia.....	43
C. Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat .....	53
D. <i>Plea Bargaining System</i> .....	58
E. Pembaharuan Hukum Pidana.....	64
 <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	 <b>69</b>
A. Konsep <i>Plea Bargaining System</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat .....	69
1. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat.....	69
2. Pelaksanaan <i>Plea Bargaining</i> di Amerika Serikat .....	81

B. Urgensi <i>Plea Bargaining System</i> dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	93
1. Alasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis dan Politik Hukum Penerapan <i>Plea Bargaining System</i> di Indonesia.....	93
2. Konsep Penggunaan <i>Plea Bargaining System</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	109
3. Perbandingan antara Jalur Khusus dan <i>Plea Bargaining System</i> ..	119
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Simpulan .....	125
B. Saran .....	126
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Perkara yang Masuk ke Mahkamah Agung tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.....	5
Tabel 2 : Tabel Perbandingan KUHAP, Jalur Khusus (RKUHAP) dan <i>Plea Bargaining</i> .....	122



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Mekanisme <i>Plea Bargaining System</i> di Amerika Serikat .....	89
Bagan 2: Mekanisme <i>Plea Bargaining System</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	118



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Tugas

Lampiran 2: Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir

Lampiran 3: Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 4: *The Federal of Criminal Procedure Rule 11*





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Restu Agung.
- Aby Maulana, 2014. *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining di beberapa negara*. Jakarta. Jurnal Hukum Staatrechts. Vol. 1 No.1. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, Dalam makalah pokok-pokok pikiran penyusunan hukum acara pidana pada tanggal 5-7 Juli 2007.
- Albert Alschuler, 1979. *Plea Bargaining and its History*. Columbia. Journal Articles. Vol. 79 No.1. Unniversity of Chicago Law School.
- Albert Alschuler, 1979. *Plea Bargaining and Its History*. Columbia Law Review. Vol. 79:1.
- Andi Hamzah, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Bambang Wijoyanto. “Politik Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Nasional”. (Tt); tersedia di <http://www.bphn.go.id>.
- Barda Nawawi arief dalam Tongat, 2010. *Hukum Pidana Indonesia : Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief, 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Black’s Law Dictionary*. 2010. 11 th Ed., West Publishing Company. page 1037.
- Choky Ramadhan. *Jalur Khusus dan Plea Bargaining*. <http://kuhap.or.id>.
- HMA Kuffal, 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang. UMM Press.

- Jean-Jacques Rousseau, 2010. *Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*. Jakarta. Dian Rakyat.
- Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia.
- Langbein, 1979. *Understanding the Short History of Plea Bargaining*. Yale Law School. Rev. 261. Yale Law School Legal Scholarship Repository.
- Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law an Introduction*. Second Edition. *Hukum Amerika sebuah pengantar*. Penerjemah wisnu basuki. PT Tata Nusa. Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2017. *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*. Jakarta. Papas Sinar Sinanti.
- M Lutfi Chakim, 2015. *Plea Bargaining*. <http://www.lutfichakim.com>.
- M.Faal, 2005. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- M.Najih, 2014. *Politik Hukum Pidana : Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*. Malang. Setara Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>.
- Mardjono Reksodipoetro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, 2009. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Misha, 2005. *Issues of Overcrowded Prisons and the Trade-Off “Plea Bargaining in the Criminal Justice”*. <http://www.associatedcontent.com>.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Muladi, 2001. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan, dan Yance Arizona, 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik (edisi 1)*. Jakarta: Epistema-HuMa.

Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Penerbit Kencana.

Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta. Bina Cipta.

Romli Atmasasmita, 2009. *Sistem Peradilan Pidana, perspektif eksistensialisme dan abolisme*. Bandung. Binacipta.

Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana.

Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta. UII Press.

Satjipto Rahardjo, 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta. Genta Publishing.

Shidarta, 2012. *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*. Jakarta. Epistema Institute.

Sidhartha Mohapatra & Hailshree Saksena, Santobello v New York, 404 US 257, 2009. *Plea Bargain: A Unique Remedy*. <http://indlaw.com>.

Sidik Sunaryo, 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang. UMM Press.

Sundari, 2014. *Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.

*The Federal Rules of Criminal Procedure* 11

Trisno Raharjo, 2011. *Mediasi Pidana dalam Sistem peradilan Pidana*. Yogyakarta. Mata Padi Pressindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Welsh S. White, 1971. *A Proposal for Reform of the Plea Bargaining Process*. University of Pennsylvania Law Review. Vol. 119 : 439.

Wildya. *Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat*. <https://www.slideshare.net>.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.

Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat)*. Jakarta. Sinar Grafika.

